



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 03 Agustus 2021

Halaman: 1

3.575 KPM Terima Bansos setelah Divaksin

JOGJA, Radar Jogja - Sebagai upaya percepatan vaksinasi menuju 'Jogja Merdeka Vaksin' 17 Agustus mendatang, berbagai cara dilakukan Pemkot Jogja. Salah satunya memodifikasi program vaksinasi sekaligus pendistribusian bantuan sosial (bansos) beras 5 kg kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dari Kementerian Sosial ■ **► Baca 3.575... Hal 3**

DIVAKSIN DAN TERIMA BAKSOS:
Pekerja menurunkan beras bansos untuk KPM di XT Square, Umbulharjo, Kota Jogja, kemarin (2/8). Foto kiri, Pemkot Jogja mengkolaborasi vaksinasi dengan pendistribusian bansos.



FOTO-FOTO: ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA

3.575 KPM Terima Bansos setelah Divaksin

Sambungan dari hal 1

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, upaya kombinasi antara vaksinasi dan pendistribusian bansos beras ini menjadi satu cara untuk mempercepat sasaran warga Kota Jogja yang harus divaksin di bulan Agustus. Sehingga, dengan mengajak KPM untuk divaksin bagi yang belum, setidaknya bisa mengejar 75 persen penduduk ber-KTP kota sudah tervaksin pada 17 Agustus. Dan, 100 persen diselesaikan hingga akhir Agustus.

"Kami perlu modifikasi agar warga kami cepat divaksin. Karena ini sudah memasuki Agustus, saya terus mempercepat program pelaksanaan vaksinasi bagi warga Kota Jogja," katanya usai meninjau vaksinasi dan distribusi bansos di XT Square kemarin (2/8).

HS menjelaskan, vaksinasi bukanlah syarat untuk mendapatkan bansos beras. Maupun untuk sengaja menunda pendistribusian bansos alokasi dari Kemensos bagi KPM. Namun, semata-mata ini dilakukan sekaligus untuk memetakan sasaran KPM yang merupakan warga Kota Jogja yang belum tervaksin.

"Jadi warga (KPM) yang sudah vaksin akan kami berikan beras langsung. Kalau yang belum se-

gyanya vaksin dulu, tidak ada niat kami menunda-nunda dalam distribusi beras ini," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Maryustion Tonang mengatakan, distribusi beras 5 kg setiap KPM ini bagian dari program pemerintah pusat. Penerima bantuan merupakan KPM di luar program Kemensos seperti PKH, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program sembako.

"Ini kebijakan Pak Wali Kota untuk mengkomposisi distribusi beras kepada KPM yang dikaitkan menuju Jogja Merdeka Vaksin. Istilahnya, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Jadi, vaksinasi yang dilakukan semakin gencar, bantuan sosial terdistribusi juga," ungkapnya.

Kota Jogja sebagai ibu kota provinsi mendapat alokasi enam ribu paket sembako dari pusat untuk enam ribu KPM. Program ini untuk kabupaten-kota di Jawa-Bali yang terdampak PPKM. Sasarannya warga miskin, rentan sosial, dan masyarakat yang terdampak PPKM.

"Datanya kita sudah ada. Dari data kemiskinan DTKS kita sandingkan di luar data BST, PKH, dan sembako ketemu sasaran itu," jabarnya.

Maka, mulai kemarin bantuan beras didistribusikan secara dua tahap. Karena muncul dua kri-

teria kelompok KPM lagi, yaitu sudah tervaksin dan belum. Dari enam ribu KPM itu, ternyata di antara 3.575 penerima belum tervaksin. Dan sebanyak 2.425 KPM sudah tervaksin.

Dari jumlah data KPM yang sudah tervaksin ini, distribusi beras tahap satu sudah dilakukan di 14 kemantren. Sedangkan selebihnya yang belum tervaksin, pendistribusian tahap dua dilakukan di XT Square sekaligus mengikuti program vaksinasi Covid-19.

"Kalau KPM kan pasti KTP-nya kota. Nah yang belum tervaksin ini sampai Kamis depan kita lakukan distribusi beras sekaligus vaksin nanti. Mereka dapat dua misi sekaligus," jelasnya yang menyebut per hari dengan sasaran 1.000 KPM di XT Square.

Sementara itu, warga Giwang-an Triyanto mengaku lega setelah mendapat bantuan beras dan vaksin Covid-19 dalam satu waktu. Terlebih selama pandemi ia menjadi warga terdampak PPKM. Ia juga belum pernah memperoleh bantuan apa pun dari pemerintah.

"Syukur *alhamdulillah* saya mengucapkan terima kasih. Karena saya belum vaksin, sekaligus hari ini divaksin sama dapat bantuan. Ini jelas sangat membantu, karena rakyat kecil seperti kami ini terdampak sekali dengan PPKM," katanya. (wla/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005